

Pelatihan Pemberdayaan Guru dalam Merancang Modifikasi Kurikulum bagi Siswa ABK di SD Negeri Sudimara Timur 2

Connie Chairunnisa¹, Rismita^{2*}

^{1,2}Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: rismita@uhamaka.ac.id

Abstract

Teacher empowerment in designing curriculum modifications for ABK students needs to be adjusted to reduce problems in managing inclusive schools, and the learning completeness of ABK students. The method used is Classical with health protocols (PSBB), for 1 (one) day and 2 (two) days using online (in-network) methods using zoom cloud meetings and WA groups, as well as learning strategies that are cognitive, affective, and psychomotor, relevant to achieving the goal, namely to increase teacher knowledge about inclusive education. The final results obtained from this teacher empowerment training are that there is little limited knowledge in dealing with and assisting ABK students, and there are some teachers who are able to identify ABK students so that some of these teachers have the ability to design an accommodative curriculum for ABK students, and teachers can present design modification of the curriculum for ABK students properly and correctly which is divided into 8 groups and each group consists of 2-3 teachers. The hope of the UHAMKA PKM team is that teachers can apply all the training that has been given.

Keywords: *Teacher Empowerment, Curriculum Modification, ABK.*

Abstrak

Pemberdayaan guru dalam merancang modifikasi kurikulum bagi siswa ABK perlu dilakukan penyesuaian untuk mengurangi permasalahan dalam mengelola sekolah inklusi, dan ketuntasan belajar siswa ABK. Metode yang digunakan adalah Klasikal dengan protokol kesehatan (PSBB), selama 1(satu) hari dan 2 (dua) hari menggunakan metode daring(dalam Jaringan) online dengan menggunakan zoom cloud meeting dan WA group, serta strategi pembelajaran yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik, relevan dengan pencapaian tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif . Hasil akhir yang diperoleh dari pelatihan pemberdayaan guru ini, terdapat sedikit keterbatasan pengetahuan dalam mengatasi dan mendampingi siswa ABK, dan ada sebagian guru yang mampu mengidentifikasi siswa ABK sehingga sebagian guru tersebut memiliki kemampuan dalam merancang kurikulum yang akomodatif bagi siswa ABK, serta para guru dapat mempresentasikan rancangan modifikasi kurikulum bagi siswa ABK dengan baik dan benar yang terbagi atas 8 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 orang guru. Harapan dari tim PKM UHAMKA adalah para guru dapat menerapkan semua pelatihan yang sudah diberikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Guru, Modifikasi Kurikulum, ABK

Accepted: 2023-03-16

Published: 2023-04-06

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sudimara Timur-2 adalah termasuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, terletak di Jl. Tanah Seratus No.5 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, ingin meningkatkan kualitas para guru serta meminimilasikan terjadinya gap di kelas antara guru dan murid, serta menghilangkan kecenderungan kesulitan dalam mengajar di kelas diperlukan pelatihan bagi guru-guru sekolah dasar. Pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar" dan "Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar" (Permendikbud, 2020).

Khususnya dalam membimbing siswa Anak Berkebutuhan Khusus. Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan

dan penyempurnaan semua potensi manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja manusia dapat melakukan proses *life long education*.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah menyediakan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 133. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler. Selain pada satuan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus juga dapat menempuh pendidikan pada sekolah terpadu. Sekolah terpadu merupakan sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana yang sama untuk seluruh peserta didik. Sekolah terpadu saat ini lebih dikenal dengan sekolah inklusif.

Dengan adanya perbedaan kemampuan individual maka Vaughn, Bos, dan Schumm (2000) menganjurkan penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi ABK sesuai dengan kebutuhan individualnya. Penempatan belajar ABK harus dipilih yang paling bebas di antara a). Kelas reguler (inklusif penuh), b). Kelas reguler dengan cluster, c). Kelas reguler dengan pull out, d). Kelas reguler dengan cluster dan pull out, e). Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Komponen pendidikan yang paling berat dirasakan adalah komponen tenaga pendidik atau guru. Guru akan sangat sulit melaksanakan pembelajaran yang bermutu apabila kurikulum tidak dilakukan modifikasi, demikian juga komponen yang lain perlu diadakan penyesuaian. Dalam implementasinya konsep pembelajaran pendidikan inklusif masih banyak yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang mendasar terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya (I. Agustin, 2017).

Banyak orang tua yang merasa malu untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke sekolah-sekolah reguler. Akan tetapi tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Disabilitas merupakan konsekuensi dari kemiskinan (Zamjani, 2019), artinya penyebab kemiskinan membuat warga yang kurang beruntung ini rentan terhadap gizi buruk dan hambatan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta merebaknya kekerasan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi penyandang disabilitas, sedangkan penyandang disabilitas punya risiko lebih tinggi menjadi miskin. Keterbatasan dalam memilih pendidikan serta kekuatan narasi dalam stereotipe budaya disabilitas. Rendahnya penguasaan belajar siswa berkebutuhan khusus di Indonesia menimbulkan beberapa tantangan yang harus dihadapi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya untuk memperoleh pekerjaan yang layak antara lain masih adanya pemikiran yang memandang disabilitas sebagai tidak produktif, dari segi sosial dan ekonomi. karena keterbatasan yang mereka hadapi. memiliki. Hal ini juga berlaku untuk promosi dan kenaikan gaji karyawan di suatu perusahaan (Chairunnisa, Connie & Rismita, 2022). Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan yang berkesinambungan, bukan hanya dari orang tua, namun juga saudara dan anggota keluarga yang lain (Marchetti, 2019). keluarga yang tidak menyandang disabilitas harus siap menjalankan fungsi sebagai pengasuh anggota lain yang menyandang disabilitas. Karena seluruh perhatian bisa jadi terfokus pada ABK, terdapat kemungkinan bahwa masa depan

anak-anak lain dalam keluarga tersebut juga dipertaruhkan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif (Herawati, 2016). Meskipun telah banyak sekolah inklusif di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pula sekolah inklusif yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut. Seperti permasalahan yang ada di SDN Sudimara Timur-2 Tangerang. Permasalahan yang urgen di lokasi mitra saat ini, adalah belum ada kurikulum khusus untuk siswa inklusi atau ABK, selain itu juga belum memiliki panduan penilaian untuk siswa inklusi, terbatasnya guru pendamping khusus yang sudah memiliki pelatihan inklusi, peralatan untuk terapi siswa ABK masih sangat minim/ terbatas, Guru juga memiliki keterbatasan waktu untuk memperhatikan perkembangan siswa inklusi. Sehingga ketuntasan belajar siswa ABK belum optimal, bahkan masih ada siswa ABK kelas 3 belum bisa membaca dengan baik dan benar. Di sekolah tersebut terdapat 13 siswa ABK sedangkan guru pendamping khusus (GPK) hanya ada satu guru yang memiliki ijazah S.Pd.LB. Jumlah siswa di SDN Sudimara Timur-2 saat ini ada sebanyak 421 siswa, dengan jumlah siswa ABK/Inklusi sebanyak 13 siswa, dan jumlah siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 65 siswa.

Solusi dari PKM ini adalah untuk meningkatkan wawasan keterampilan para guru dan Kepala Sekolah dalam mengelola dan menjalankan amanah sebagai sekolah inklusi, sehingga sekolah diharapkan juga dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi dengan ABK. Lebih spesifik lagi tujuan dan manfaat dari kegiatan pemberdayaan guru ini adalah: (1) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam mengintegrasikan pengajaran dengan pengembangan guru, pengembangan kurikulum bagi siswa ABK, (2) Bermanfaat bagi guru untuk melatih guru agar dapat memberikan perlakuan kepada para siswa atau responden yang diteliti treatment yang nyata di sekolah, seperti pemberian hand-outs dalam pembelajaran, metode mengajar yang terencana dan dapat menyiapkan buku acuan belajar untuk siswa, khususnya siswa ABK, dan (3) Dapat menuntaskan pembelajaran bagi siswa ABK, melalui bina diri, bina sosial, bina membaca dan menulis, bina budaya pendidikan inklusif bagi guru, siswa dan orang tua siswa.

Solusi yang ditawarkan dari Pelatihan Pemberdayaan Guru di SDN Sudimara Timur-2 ini, adalah sebagai berikut: (1) Melatih guru agar memahami jenis ketunaan yang dimiliki oleh siswa ABK, (2) Melatih guru dalam merancang modifikasi kurikulum bagi siswa ABK, (3) Melatih guru dalam keterampilan membuat klasifikasi ketuntasan belajar siswa ABK, (4) Melatih guru terampil di dalam membuat penilaian kepada siswa ABK, dan (5) Melatih guru dapat membuat presentasi membuat modifikasi kurikulum bagi siswa ABK.

Target luaran dari PKM ini adalah sebagai berikut:

Table 1. Target Luaran

Isu Prioritas	Permasalahan	Solusi	Bidang Unggulan	Kegiatan Program	Kemitraan	Capaian Luaran
Guru masih kurang memahami pendidikan inklusif Guru belum terampil merancang modifikasi kurikulum	Masih terdapat kendala dalam implementasi pendidikan inklusif. Khususnya modifikasi kurikulum bagi siswa ABK	1. Memberikan Ilmu tentang Jenis ABK 2. Memberikan Ilmu merancang modifikasi kurikulum ABK 3. Praktik dan pendampingan	Pelatihan pemberdayaan guru dalam merancang modifikasi kurikulum bagi siswa ABK di SDN Sudimara Timur-2 Tangerang	PKM Reguler	SDN Sudimara Timur-2 Tangerang	1. Artikel Jurnal 2. Vidio https://youtu.be/-m0piWbfsQw 3. Berita Masa https://madrashdigital.co/berita/pelatihan-merancang-modifikasi-kurikulum-bagi-siswa-abk/

METODE

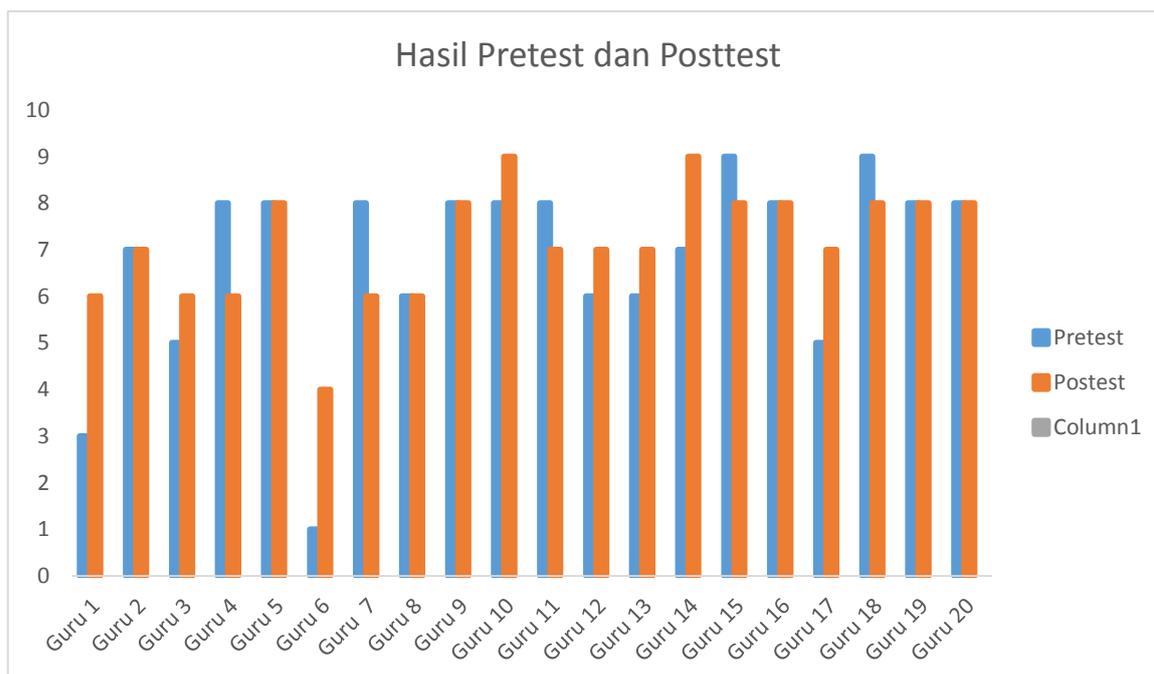
Metode Pelaksanaan kegiatan PKM adalah (1). Metode klasikal menggunakan *zoom cloud meeting (online)* dengan strategi pembelajaran yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik, relevan dengan pencapaian tujuan yaitu guru dapat memahami jenis dan klasifikasi ABK dan cara melayaninya, (2). Metode berperan serta di dalam kelompok, disesuaikan dengan masing-masing guru kelas dan guru bidang studi . Guru dapat membuat pengembangan kurikulum dan RPP yang di modifikasi bagi siswa ABK, (3). Pendampingan praktik dalam merancang modifikasi kurikulum untuk siswa ABK dan diskusi, tentang permasalahan yang dihadapi guru dalam melayani siswa ABK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM pada SD Negeri Sudimara Timur-2 ada beberapa hasil, yaitu: **Hasil Pertama**, memberikan pre test sebelum diadakan pemberian materi oleh tim PKM kepada 20 orang guru yang membimbing siswa ABK untuk mengetahui kemampuan guru mengenai pendidikan inklusi dan setelah pemberian materi melaksanakan pos test untuk mengetahui perkembangan pengetahuan para guru. Hasil pre test dan post test yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest

No.	Guru	Pretest	Posttest	Keterangan
1.	Tiaranadhillaeka Putri	3	6	Meningkat 3
2.	Wilantiandamari	7	7	Tetap
3.	Tirto winoto,	5	6	Meningkat 1
4.	Pendi supendi	8	6	Menurun 2
5.	Mudari	8	8	Tetap
6.	Rodih	1	4	Meningkat 3
7.	Ria fahriyah	8	6	Menurun 2
8.	M. Sobri	6	6	Tetap
9.	Nurdianah	8	8	Tetap
10.	Harni Harfaunisah	8	9	Meningkat 1
11.	Febri Eka	8	9	Meningkat 1
12.	Malina Suciati	6	7	Meningkat 1
13.	Fardilah Sari	6	7	Meningkat 1
14.	Zuly Rahmadani	7	9	Meningkat 1
15.	Ratna Dewi	9	9	Tetap
16.	Siti Rohmah	8	8	Tetap
17.	Dinar Salami	5	7	Meningkat 1
18.	Siti Aliyah	9	8	Menurun 1
19.	Hernawaty	8	8	Tetap
20.	Badriah	8	8	Tetap



Gambar 1. Hasil Pretest dan Posttest

Berdasarkan table 2 dan gambar 1 di atas, menjelaskan terdapat tiga kategori guru dalam mengikuti pelatihan, yaitu (1). Guru yang mempunyai kemampuan tentang pengetahuan dan mendampingi siswa ABK mengalami peningkatan pengetahuan, (2). Guru yang sebelum mengikuti pre test dan post test mempunyai pengetahuan yang sama, dan (3). Guru yang mengalami penurunan mengenai pengetahuan dalam mendampingi siswa ABK.

Guru yang punya peningkatan pengetahuan tentang ABK adalah sebanyak 9 orang (45%), artinya bahwa beberapa guru tersebut sudah terbiasa mengatasi atau menangani anak berkebutuhan khusus yang punya wawasan dan kemampuan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus (Hermanto SP, 2008), dan mempunyai pengalaman dalam mengatasi siswa ABK dan memahami masalah yang dihadapinya dalam mengatasi siswa ABK. Hal ini juga menjelaskan bahwa guru SD negeri Sudimara Timur-2 mempunyai sikap positif dalam mengatur instruksi dan kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus (Putri & Hamdan, 2021). Penelitian terkait menyatakan bahwa beberapa guru tersebut mengenali dan mampu mengidentifikasi siswa ABK yang merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh guru Sekolah Dasar, dan guru yang memiliki kompetensi kurikulum yang fleksibel dan akomodatif (Anggriana & Trisnani, 2016).

Guru yang memiliki pengetahuan yang sama antara pre test dengan post test sebanyak 8 orang (40%), menjelaskan bahwa para guru dalam kondisi ini adalah guru yang mempunyai kesiapan mengajar ABK dalam membimbing dan mendampingi siswa ABK mengalami kesamaan dalam kasus siswa yang ditangani, sehingga cara atau strategi mengajarnya sama. Senada dengan hal ini yang menyatakan bahwa kesiapan sikap, keterampilan, dan pengetahuan merupakan factor pendukung guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus (Wardhani, 2020).

Hasil perolehan guru yang mengalami penurunan dalam menjawab soal pretest ke posttest menunjukkan beberapa guru kurang memadai dalam mendampingi dan melayani siswa ABK. Penelitian terkait menyatakan bahwa guru tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan profesional dalam mengatasi anak berkebutuhan khusus (Ramadani, 2017), dan guru tersebut belum punya pengalaman atau bukan bidangnya, sehingga mempunyai keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami anak berkebutuhan khusus (Hermanto SP, 2008), serta

pengetahuan guru mengenai karakteristik ABK, dan strategi dalam mendidik ABK masih sangat minim (L. D. Agustin & Pandia, 2014).

Hasil kedua: hasil pendampingan praktik dalam merancang modifikasi kurikulum siswa ABK, yaitu (1). Presentasi kelompok kelas 1 s.d kelas 6, merancang modifikasi sudah benar, hanya sedikit kesalahannya, dan (2). Presentasi kelompok bidang studi, dalam merancang modifikasi masih ada yang kurang tepat, sehingga diperlukan ada nya perbaikan. **Hasil ketiga:** diskusi dengan para guru tentang permasalahan dalam praktik di kelas, yaitu (1). Guru kelas 5 (ibu Maulina Suciati) : kesulitan membuat bahan ajar untuk siswa ABK, karena keterbatasan bahan material, (2). Guru kelas 6 (bpk Tirto Winoto) : kesulitan di dalam memberikan bahan pelajaran karena siswa ABK tidak memahami cerita yang Panjang di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, ataupun pelajaran matematika, (3). Guru kelas 2 (ibu Tia) : mengatakan bahwa kesulitan mengajar bagi siswa tuna grahita dan low vision, memerlukan modifikasi kurikulum yang bisa diterapkan, dan (4). Guru Kelas 4 (ibu Ratna Dewi): mengatakan bahwa ada siswa ABK di kelasnya yang low-vision, dan sudah sangat berat penglihatannya, sehingga jika tidak di obati akan semakin parah (kemungkinan tidak bisa melihat/buta), hal ini sudah di informasikan kepada orang tuanya, tapi karena dari keluarga miskin, tidak dapat berbuat banyak.

KESIMPULAN

Pemberdayaan guru dalam merancang modifikasi kurikulum bagi siswa ABK merupakan factor penting untuk meningkatkan wawasan para guru dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi ABK. Dalam melaksanakan PKM di SD Negeri Sudimara Timur-2 diperoleh sedikit keterbatasan pengetahuan dalam mengatasi dan mendampingi siswa ABK, dan ada sebagian guru yang mampu mengidentifikasi siswa ABK sehingga sebagian guru tersebut memiliki kemampuan dalam merancang kurikulum yang akomodatif bagi siswa ABK. Berdasarkan presentasi per kelompok para guru mampu mempresentasikan rancangan modifikasi kurikulum bagi siswa ABK dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2017). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Sumpersari 1 Kota Malang. *Education and Human Development Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33086/ehdj.v1i1.290>
- Agustin, L. D., & Pandia, W. S. S. (2014). Pemahaman Pedagogik Guru dalam Mengajar. *Provita Jurnal Psikologi Pendidikan*, 6(1), 73–98.
- Anggriana, T. M., & Trisnani, R. P. (2016). Kompetensi Guru Pendamping Siswa Abk Di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 157–164. <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.702>
- Chairunnisa, Connie & Rismita, R. (2022). Educational challenges for children with special needs in inclusive primary schools. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 6(1), 48–56. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/view/39722/pdf>
- Herawati, N. (2016). PENDIDIKAN INKLUSIF. *Eduhumaniora Jurnal Pendidikan Dasar*, (March), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/eh.v2i1.2755>
- Hermanto SP. (2008). Kemampuan Guru Dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 15(1), 1–13.
- Marchetti, A. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6, 186–195. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551972>
- Permendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020*. 14.

- Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p138-152>
- Ramadani, I. D. (2017). Layanan Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra Low Vision Kelas V Sd Muhammadiyah Bogor. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 9(6), 858–865.
- Wardhani, M. K. (2020). Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(2), 152–161. <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i2.p152-161>
- Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar : Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Lima Daerah Analyzing the Inclusiveness of Smart Indonesia Program : a Case Study of Its Implementation for Special Needs Children in Five Districts. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4, 15–32.